

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Amiruddin dan Zainal Asisskin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Asfinawati dan Mas Achmad Santosa. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, dan Perbandingan di Berbagai Negara*. Jakarta : LBH Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2020. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Yage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Budiyanto. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta : PT Buana Ilmu Populer.
- LBH Jakarta. 2010. *Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur*. Jakarta : LBH Jakarta.

Mulyana W Kusumah. 1991. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*. Jakarta : YLBH.

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

YLBHI. 2014. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Isnandar Syahputra Nasution. 2015. *Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 4. No.1.

Gede Agung Wirawan Nusantara. 2016. *Eksistensi Paralegal dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 5. No.2.

Eka N.A.M Sihombing. 2019. *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol 6. No.1.

Sri Warjiyati. 2017. *Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*. *Jurnal DIMAS*. Vol.17. No. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.

D. Website

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (bps.go.id).

Catatan Pelanggaran HAM Sumatera Barat Tahun 2022, <https://lbhpadang.org/catatan-pelanggaran-ham-di-sumatera-barat-tahun-2022/>

Data Kriminalitas, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (bps.go.id)